



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

Pages: 159–168

Studi Komperatif Gaya Kepemimpinan Pemerintah di Negara Berkembang dan Negara Maju dalam Menghadapi Krisis Ekonomi

Ajeng Pratiwi, Eli Apud Saepudin, Nurul Aini, Alin Nursipa, Anastasya Yuniarti, Galang Yudistias

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2389>

How to Cite this Article

APA : Pratiwi, A. ., Saepudin, E. A., Aini, N., Nursipa, A., Yuniarti, A., & Yudistias, G. (2024). Studi Komperatif Gaya Kepemimpinan Pemerintah di Negara Berkembang dan Negara Maju dalam Menghadapi Krisis Ekonomi. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 159 - 168. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2389>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

Studi Komperatif Gaya Kepemimpinan Pemerintah di Negara Berkembang dan Negara Maju dalam Menghadapi Krisis Ekonomi

**Ajeng Pratiwi¹, Eli Apud Saepudin², Nurul Aini³, Alin Nursipa⁴, Anastasya Yuniarti⁵,
Galang Yudistias⁶**

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang,
Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email Korespondensi : ajengprtwi085@gmail.com

Diterima: 20-11-2024

| Disetujui: 21-11-2024

| Diterbitkan: 22-11-2024

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis perbandingan gaya pemerintahan di negara berkembang dan maju dalam menghadapi krisis ekonomi. Dalam situasi dunia yang semakin rumit, krisis ekonomi perlu tanggapan yang cepat dan efektif dari pemerintah. Maka dari itu, penting untuk memahami bagaimana gaya kepemimpinan berkontribusi terhadap manajemen krisis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa negara yang mewakili masing-masing kelompok negara maju dan berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan di negara maju cenderung lebih sistematis dan berbasis bukti. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan juga merupakan hambatan utama dalam mengembangkan kebijakan yang efektif. Studi ini menemukan bahwa faktor budaya, tingkat pelebagaan, dan partisipasi masyarakat berperan dalam situasi krisis.

Katakunci: Gaya Kepemimpinan; Krisis Ekonomi; Negara Maju; Negara Berkembang.

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi merupakan tantangan serius yang senantiasa membahayakan stabilitas sosial dan politik suatu negara. Pada tingkat global, permasalahan ini tidak hanya menimpa negara-negara maju, namun juga negara-negara berkembang. Salah satu variabel utama yang mempengaruhi respons dan kejadian yang tidak dapat dihindari adalah kepemimpinan pemerintah. Ada banyak gaya kepemimpinan yang berbeda, yang disebabkan oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara. Sementara pemimpin di negara berkembang mungkin bergantung pada hubungan pribadi dan membangun jaringan sosial, pemimpin negara maju biasanya menggunakan metode berbasis bukti yang sistematis untuk pengambilan keputusan. Perbedaan ini akan mengarah pada efektivitas kebijakan terimplementasi dan kesulitan jangka panjang dari krisis ekonomi. Negara-negara maju dengan infrastruktur ekonomi yang lebih kuat dan sistem pemerintahan yang lebih mapan seringkali mampu merespons krisis dengan pendekatan yang lebih terencana dan berbasis data. Sebaliknya, negara-negara berkembang seringkali menghadapi tantangan struktural dan sumber daya yang terbatas dan mungkin perlu mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih adaptif dan terkadang otoriter untuk menghadapi keadaan darurat. Sejarah mencatat berbagai krisis ekonomi yang melanda dunia memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda-beda. Lihat bagaimana negara-negara merespons tantangan ekonomi yang kompleks, mulai dari krisis keuangan Asia tahun 1997 hingga krisis keuangan global tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan gaya kepemimpinan dua kategori negara dalam situasi krisis ekonomi. Studi ini berupaya memahami bagaimana faktor-faktor lokal, seperti budaya politik dan tingkat partisipasi masyarakat, mempengaruhi keputusan para pemimpin dengan menganalisis berbagai kasus dan tindakan pemerintah selama krisis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika kepemimpinan dalam situasi krisis dan memberikan implikasi bagi strategi pemulihan ekonomi yang lebih efektif di masa depan.

Krisis ekonomi dapat diartikan sebagai keadaan dimana masyarakat tidak lagi mempercayai pemerintah suatu negara, khususnya dalam urusan keuangan. Ketika gejolak ekonomi terjadi di salah satu negara maju, krisis ekonomi tersebut mempunyai dampak yang luas dan dampaknya yang luas disebut krisis ekonomi global. Krisis ekonomi ini menimpa beberapa negara, termasuk Indonesia dan Korea Selatan. Ketika krisis ekonomi terjadi, penyebab utama krisis tersebut adalah bunga yang dibayarkan akibat gangguan akibat krisis ekonomi tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan pemerintah. (Keumala Sari and Fakruddin 2016)

Presiden di Korea Selatan yang dipimpin oleh Kim Dae-jung, digantikan oleh Presiden Kim Young Sam pada tahun 1998. Krisis ekonomi di Korea Selatan pertama kali terjadi pada bulan November 1997, menyusul krisis Thailand pada bulan Juli 1997. Yang terjadi di Korea Selatan saat itu adalah penurunan ekonomi yang signifikan dari 5% pada tahun 1997 menjadi 6,7% pada tahun 1998. 6% vs 6,8% vs 8%. Dapat dikatakan bahwa krisis ekonomi yang dialami oleh kedua negara Asia ini ditandai dengan pendekatan dan Keputusan politik yang sangat berbeda dari para pemimpin kedua negara saat itu. Selain perbedaan dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan, terdapat juga perbedaan signifikan antara Presiden Suharto dan Presiden Kim Dae-jung jika mempertimbangkan latar belakang dan gaya kepemimpinan mereka. Terutama pada cara dan pendekatan para pemimpin kepada pemerintahan kedua negara dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda beberapa negara di Asia pada tahun 1997. (Sik 2010)

Berkaitan dengan hal tersebut tentunya sangat menarik untuk membahas perbedaan respon antara dua pemimpin negara berbeda, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menangani krisis ekonomi di negaranya masing-masing. Kajian ini membahas pentingnya krisis ekonomi dan dampaknya pada tingkat regional dan internasional. Kajian ini mengkaji bagaimana kepribadian Presiden Suharto dan Presiden Kim Dae-jung mempengaruhi teori tunggal dan teori minor, khususnya dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi krisis mata uang, serta kekuatan dan kelemahan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan keberhasilannya dalam menerapkan langkah-langkah ini. (Iriansyah 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji gaya kepemimpinan dan respon kebijakan. Metode ini memungkinkan pengumpulan data lebih detail dan kontekstual. Hal ini memungkinkan dilakukannya analisis rinci mengenai kebijakan pemerintah dalam situasi krisis di negara-negara tertentu. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik gaya kepemimpinan yang ditemukan dalam studi kasus. Studi ini juga memberikan perbandingan yang jelas mengenai respons kebijakan di negara maju dan berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gaya kepemimpinan memiliki peran dalam menghadapi krisis ekonomi di negara maju sering kali lebih fokus menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi. Memiliki institusi yang kuat dan mekanisme pasar yang efisien sehingga kebijakan lebih bersifat teknis dan berorientasi data. Masyarakat di negara maju memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan cenderung kritis terhadap kinerja pemerintah. Pemimpin di negara maju memiliki visi jangka panjang dalam membangun ekonomi kembali setelah mengalami krisis, pada reformasi struktural di perlukan meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

Di negara berkembang seorang pemimpin harus menjaga stabilitas politik krisis ekonomi sering kali memicu ketidakstabilan politik, sehingga pemimpin mampu mengelola kedua aspek tersebut secara bersamaan pemerintah di negara berkembang mengambil peran yang lebih aktif dalam mengatasi krisis, melalui intervensi langsung dalam pasar. Tekanan politik dan sosial sering kali memaksa pemimpin di negara berkembang untuk fokus pada solusi jangka pendek seperti pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi.

Gaya Kepemimpinan di Negara Maju dan Negara Berkembang

Studi ini mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan gaya pemerintahan antara negara berkembang dan negara maju dalam situasi krisis ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan kategori negara sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, sosial dan politik. Diukur dari gaya kepemimpinan pemerintah di negara berkembang dan maju dalam menghadapi krisis ekonomi: Gaya kepemimpinan di negara maju: Mengadopsi pendekatan partisipatif, berbasis data, dan transparan. Kebijakan dikembangkan melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan informasi dikomunikasikan dengan jelas kepada masyarakat. Sebaliknya, negara-negara berkembang cenderung menganut pendekatan otoriter dan top-down. Keputusan sering kali dibuat tanpa keterlibatan masyarakat,

dan tanggapannya bersifat reaktif dan tidak direncanakan dengan baik. Diukur dari partisipasi masyarakat: Sebaliknya, negara-negara maju memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dalam proses politik, sehingga membantu menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepercayaan. Misalnya, program bantuan sosial sering kali memasukkan masukan masyarakat ke dalam rancangannya. Sebaliknya, di negara-negara berkembang, partisipasi masyarakat seringkali terbatas. Banyak tindakan yang diterapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan lokal, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Diukur dari Komunikasi dan Transparansi: Di negara maju, komunikasi dan transparansi bersifat efektif dan terbuka, sehingga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat pada umumnya jelas dan transparan. Informasi rutin mengenai langkah-langkah kebijakan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun komunikasi dan transparansi kurang efektif di negara berkembang karena informasi yang disampaikan seringkali tidak jelas dan kurang transparan. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Dalam hal inovasi dan adaptasi: Di negara maju, inovasi dan adaptasi, khususnya fleksibilitas melalui penggunaan teknologi dan inovasi dalam kebijakan publik, seperti penggunaan aplikasi digital dalam distribusi bantuan, memiliki tingkat kemampuan beradaptasi yang tinggi. Di sisi lain, negara-negara berkembang juga menghadapi permasalahan infrastruktur. Meskipun terdapat upaya-upaya inovatif, banyak negara berkembang menghadapi kendala infrastruktur dan sumber daya yang signifikan yang membatasi kemampuan mereka untuk beradaptasi secara efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan adanya perbedaan signifikan antara gaya pemerintahan negara berkembang dan negara maju dalam menyikapi krisis ekonomi. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kelembagaan, kapasitas negara, konteks politik, dan faktor eksternal. Dinamika Gaya Kepemimpinan: Di negara-negara maju, gaya kepemimpinan kolaboratif menciptakan lingkungan di mana kebijakan dapat dengan cepat disesuaikan berdasarkan masukan dari masyarakat. Misalnya, pada saat krisis ekonomi global tahun 2008, banyak negara maju, seperti Kanada, memasukkan berbagai sektor dalam pengembangan rencana pemulihan ekonomi, yang terbukti efektif dalam mempercepat pemulihan. Negara-negara maju juga cenderung sangat bergantung pada instrumen kebijakan moneter (misalnya penurunan suku bunga) dan fiskal (misalnya stimulus) untuk menstimulasi perekonomian mereka. Kebijakan ini diterapkan dengan cepat dan tegas untuk meminimalkan dampak negatif krisis, sehingga sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam proses pemulihan ekonomi. Pemerintah di negara-negara maju sering berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan. Apalagi stabilitas sistem keuangan menjadi prioritas utama. Pemerintah di negara-negara maju sering melakukan intervensi untuk mencegah terjadinya krisis keuangan besar. Sebaliknya, gaya kepemimpinan otoriter di negara-negara berkembang sering kali mengakibatkan pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan suara masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan-kebijakan yang tidak memenuhi kebutuhan lokal dan meningkatkan ketidakpuasan. Selain itu, negara-negara berkembang cenderung sangat bergantung pada tindakan pengendalian harga dan perlindungan industri dalam negeri untuk melindungi perekonomian dalam negerinya, dan oleh karena itu sering kali memerlukan dukungan finansial dan teknis dari lembaga keuangan internasional untuk mengatasi krisis. Hal ini juga berfokus pada upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Partisipasi Masyarakat dan Pengambilan Keputusan: Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di negara maju tidak hanya meningkatkan legitimasi politik tetapi juga membantu pemerintah lebih memahami dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dalam program sosial kami, yang

dirancang berdasarkan masukan dari komunitas kami. Di negara-negara berkembang, kurangnya peserta dapat berarti bahwa langkah-langkah yang diterapkan tidak efektif. Misalnya, keputusan yang diambil tanpa konsultasi dapat menimbulkan protes dan penolakan terhadap Petunjuk tersebut dan menghambat implementasi efektifnya. Peran Komunikasi dalam Membangun Kepercayaan: Komunikasi yang jelas dan terbuka membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat di negara-negara maju. Ketika masyarakat merasa mendapat informasi dan terlibat, mereka cenderung mendukung kebijakan pemerintah. Di negara-negara berkembang, kurangnya transparansi dan komunikasi yang efektif dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan kekecewaan masyarakat. Informasi yang tidak jelas atau tidak akurat dapat memperburuk ketegangan sosial, terutama dalam situasi krisis.

Krisis ekonomi tahun 1997 menjadi fenomena politik dan ekonomi yang besar di Asia, khususnya di Korea Selatan dan Indonesia. Dalam makalahnya yang berjudul “Demokratisasi Krisis 1997,” Kim Dae Jung (Presiden Korea Selatan) menganjurkan restrukturisasi organisasi (chaebol) untuk mendorong fleksibilitas di pasar sumber daya manusia, meliberalisasi pasar domestik, dan menarik investasi. Sementara itu, Pada tahun 1997 Suharto (Presiden Indonesia) memperkenalkan sistem patronase dan program reformasi struktural untuk mengatasi krisis ekonomi. Perumusannya lebih dipahami. Variabel dalam teori meliputi pengalaman dan karakteristik yang dipengaruhi oleh persepsi, perhitungan, dan keputusan lainnya. Alternatifnya, teori ini mengacu pada psikologi atau prediksi.

Dengan fokus pada teori singularitas, kedua pemimpin negara tersebut, mampu mengidentifikasi perbedaan penting dalam pengambilan kebijakan terkait fenomena krisis ekonomi tahun 1997. Teori unik tersebut bisa menjelaskan mengapa kebijakan yang diambil pemerintah Korea Selatan menyelesaikan krisis ekonomi tahun 1997 lebih cepat dibandingkan Indonesia. Buku Memahami Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri menjelaskan tiga indikator model analitis yang unik:

Leader’s Personality (kepribadian pemimpin)

Leadership Personality menyebutkan bahwa kepribadian seseorang merupakan perpaduan antara regulasi emosi, kesadaran, penilaian, dan teknik berbasis tujuan. Tingkat energi, neurotisisme, jenis kelamin, ras, budaya, etnis, dan motivasi lainnya dapat menentukan kepribadian seseorang

Leadership Style (gaya kepemimpinan)

Gaya kepemimpinan adalah ukuran untuk menganalisis mengapa manajer menggunakan alternatif. Alex Mintz menguraikan berbagai gaya kepemimpinan sebagai berikut:

1. Orientasi tujuan dan orientasi konteks: Orientasi tujuan adalah gaya pengambilan Keputusan yang sering digunakan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Gaya ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang tidak peduli dengan keadaan jangka panjang dan tidak transparan terhadap informasi baru. Sebaliknya, gaya berorientasi konteks merupakan kebalikan dari gaya berorientasi tujuan yaitu selalu memperhatikan situasi jangka panjang dan aktif mencari informasi baru.
2. Orientasi Tugas vs. Orientasi Konteks: Orientasi tugas adalah gaya kepemimpinan yang tangguh dan aman secara ideologis. Itu tidak peduli dengan keadaan jangka Panjang dan tidak transparan tentang informasi baru. Sebaliknya pemimpin yang “berorientasi situasi” mengabaikan kebutuhan untuk kerja sama yang luas ditingkat nasional atau internasional sebelum mengambil Tindakan.

Leadership Type (tipe pemimpin)

Ada berbagai tipe orang. Tipe yang berbeda dapat menghasilkan kualitas politik yang berbeda pula. Alex Mintz juga menjelaskan tipe-tipe pemimpin dunia:

1. Tentara Salib adalah tipe pemimpin yang tertutup terhadap informasi baru dan melanggar batas politik. Tentara Salib Evangelis dan Ekspansionis adalah dua jenis. Ketika seorang pemimpin ingin memegang kendali atas posisinya, ekspansionis tidak tahu cara memilih alternatif. Sebaliknya, penginjil cenderung membangun hubungan yang nyaman dan menghasilkan solusi.
2. Pemimpin strategi memahami jenis informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Pemimpin strategis yang berani namun berhati-hati dalam mengambil keputusan (penuh dengan pertimbangan).
3. Pemimpin yang pragmatis dan menghargai keadaan saat ini. Namun, jenis ini tidak efektif dalam menyampaikan informasi.
4. Petunjuk dan Saran. Meskipun menghadapi tantangan politik, pemimpin ini tetap fokus pada masalah. Mereka selalu mengikuti posisi elit.
5. Reaktif dan responsif. Pemimpin tipe ini cenderung mempunyai motif yang bijak dalam segala pengambilan kebijakan luar negeri. Motif ini diterapkan di daerah pemilihan dan konsisten dengan mempertimbangkan keputusan yang dapat memenuhi kebutuhan politik. Selain cerdas, pria ini juga merupakan pencari konsensus dan pembangun jembatan yang berupaya meningkatkan akuntabilitas dan prestise.

Krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997

Krisis ekonomi mengacu pada situasi di mana situasi perekonomian suatu negara memburuk dengan cepat, biasanya disebabkan oleh lemahnya fundamental suatu negara, seperti inflasi yang tinggi atau pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Ketidakmampuan suatu negara untuk membayar kembali beban utang luar negerinya, beban utangnya melebihi kemampuannya membayar, neraca pembayarannya yang besar, kondisi yang tidak terkendali, investasi yang tidak efisien, dan lain-lain dapat terjerumus ke dalam krisis ekonomi. Tahun 1997 merupakan tahun kelam bagi beberapa negara di Asia. Pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 2 Juli, beberapa negara Asia mengalami krisis ekonomi. Thailand memulai dengan beban utang luar negeri yang sangat tinggi dan memutuskan untuk mengambang nilai tukar mata uang nasionalnya, baht. Thailand melindungi cadangan devisanya dari spekulator mata uang dan menghasilkan pendapatan di sektor ekspor dengan membiarkan mata uangnya, baht, mengambang. Kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah Thailand tidak berjalan dengan baik dan gagal sehingga berdampak pula pada perekonomian negara Asia tersebut. (1 Political Institutions and the Economic Crisis in Thailand and Indonesia Andrew MacIntyre * in T.J. Pempel (ed.) 1999)

Thailand, Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia termasuk di antaranya. Banyak orang percaya bahwa selama krisis ekonomi ini, perekonomian Indonesia akan tetap stabil, aman, dan baik, dan tidak akan bernasib buruk seperti negara-negara Asia lainnya yang terkena dampak. Indonesia adalah salah satu negara Asia Tenggara pertama yang merasakan krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Krisis ini menyebabkan ketidakstabilan nilai mata uang di Asia Tenggara dan para pengelola keuangan internasional menarik dananya dari negara-negara tersebut. Rupiah mengalami devaluasi yang sangat tajam dari Juli hingga Desember 1997. Menurut studi Bank Dunia yang diterbitkan pada bulan Juli 1998, "Indonesia in Crisis, Macroeconomic Update", nilai rupiah terhadap dolar meningkat sebesar 10,7% pada bulan Juli, 25,7% pada

bulan Agustus, dan 39,8% pada bulan September. Namun, dia menyatakan penurunan sebesar 55,6% pada bulan Oktober dan November, dan 109,6% pada bulan Desember.

Kebijakan Soeharto dalam menangani krisis moneter pada tahun 1997

Ketika krisis terjadi, Presiden Soeharto memimpin Indonesia. Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi. Di antaranya adalah kebijakan penghematan valuta asing, pengurangan pembelian dolar AS oleh Bank Indonesia, penundaan proyek besar, dan kenaikan suku bunga BI. Rencana ini meningkatkan biaya modal, membuatnya lebih mahal, dan membuat Indonesia membutuhkan bantuan dari Dana Moneter Internasional. Teori tunggal menyatakan bahwa Presiden Soeharto dikenal dengan cara kepemimpinannya yang otoriter. Pembangunan dan stabilitas negara adalah prioritas utama dalam kepemimpinan Presiden Soeharto. Kehidupan anak-anak Presiden Soeharto sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, jelas bahwa Presiden Soeharto tahun itu adalah individu yang memiliki sifat yang unggul. Presiden Soeharto selalu ramah, murah senyum, dan bersahabat dengan semua orang. Presiden Soeharto menganut tiga prinsip selama hidupnya: aja gumunan (jangan suka terheran-heran), aja kagetan (jangan terperanjat), dan aja dumeuh. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia mendapat respek dari negara lain dan pertumbuhan ekonominya meningkat. Kepribadian Presiden Soeharto membuatnya disegani oleh banyak orang. Meskipun dia tidak banyak berbicara, orang-orang di Indonesia tetap menghormatinya.

Kebijakan Kim Dae jung dalam Krisis Moneter tahun 1997 di Korea Selatan

Krisis ekonomi 1997 melanda beberapa negara lain selain Indonesia. Korea Selatan adalah salah satunya. Korea Selatan menerima pinjaman sebesar \$40 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) sebelum krisis mata uang tahun 1997 muncul. Pemerintahan Kim Dae-jung mengubah perekonomian Korea Selatan untuk mengatasi krisis. Langkah ini memanfaatkan dana dari Bank Dunia, IMF, dan negara maju lainnya (seperti AS, Jepang, dll.) selain dukungan finansial dari IMF. Deregulasi ekonomi adalah kebijakan pemerintahan Kim Dae-jung berikutnya untuk mendorong intervensi pemerintah di pasar, privatisasi ekonomi, dan liberalisasi pasar modal melalui serangkaian langkah restrukturisasi dan reformasi di bidang korporasi, keuangan, tenaga kerja, dan publik. sektor. Rangkaian tindakan tersebut mempunyai makna menggeser pola berorientasi negara menjadi pola berorientasi pasar.(Surapati et al. 2021)

Oleh karena itu, keberadaan dan peran IMF dinilai sangat bermanfaat bagi negara-negara yang saat ini dilanda krisis mata uang di Asia. Hal ini ditandai dengan kebangkitan perekonomian Korea yang lebih cepat dibandingkan perekonomian negara Asia lainnya. Kim Dae-jung juga percaya bahwa intervensi berlebihan dalam perekonomian menyebabkan kesulitan ekonomi.(Surapati et al. 2021)

Ketika krisis terjadi, Kim Dae-jung juga meminta kerja sama masyarakat dalam menyelenggarakan kampanye penggalangan dana dan meminjamkan aset kepada untuk rekonstruksi Korea pasca krisis. Oleh karena itu, dilihat dari strategi yang ditegaskan Kim Dae-jung, berhasil karena masyarakat menyerahkan segala yang dimilikinya demi kebaikan bersama. Seluruh warga Korea Selatan merasakan penderitaan yang sama, dan kami dengan tulus akan bekerja sama untuk mengatasi ini dan menyerahkan segalanya kepada pemerintah.(Kaloka, Tegar, and Eldy 2019).

Krisis mempunyai arti yang cukup luas. Menurut Haberer, krisis adalah “suatu penyimpangan yang signifikan dalam kegiatan ekonomi, titik awal dari tren penurunan atau titik balik peningkatan dalam

kegiatan ekonomi” (Estey, 1960). Demikian pula, Mitchell mendefinisikan krisis sebagai situasi ekonomi yang sudah ada, dengan kata lain suatu jenis resesi (tetapi bukan resesi).

Sebaliknya, menurut para ekonom, secara sederhana krisis disebabkan oleh permasalahan keuangan, terutama ketika masyarakat tidak mau lagi menabung di bank karena harga yang lebih tinggi dari sebelumnya dan tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah.

Berbeda dengan mereka yang menyalahkan krisis pada banyak hal penting. Pertama, kerugian di pasar keuangan. kedua, lembaga keuangan kehilangan separuh asetnya. Ketiga, ketakutan bank terhadap gagal bayar dan resesi ekonomi dan keempat, penurunan aset lembaga keuangan.

Nilai mata uang dan pasar saham. Intinya, sekuritas dari perusahaan yang terdaftar terkait erat dengan jual beli, yang merupakan sumber utama penanaman modal eksternal oleh perusahaan dan pemerintah. (Asia and Widarjoio 2003)

Percaya atau tidak, krisis keuangan ini akan terulang kembali. Sebab, sebagaimana dikemukakan Grant (1998), seorang pengamat pasar modal yang mempelajari sejarah keuangan menulis dalam bukunya “Trouble with Prosperity” bahwa keuangan adalah sebuah siklus kemakmuran. Selalu ada periode Abad Kegelapan, atau sebaliknya. (Sihono 2012)

Dampak krisis keuangan selalu berkaitan dengan indikator makroekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Asia Timur menurun dari kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia menjadi kawasan di mana beberapa negara anggota mengalami pertumbuhan pendapatan negatif pada tahun 1998, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea, Filipina, Thailand. Namun, krisis Asia Timur tahun 1997 menghasilkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka dummy krisis keuangan global tahun 2008. Hal ini sesuai dengan ekspektasi sejak krisis Asia Timur tahun 1997 terjadi di Asia Timur. Masalah di kawasan Asia ini mempunyai akar internal di kawasan ini, pertama kurangnya kredibilitas kebijakan dan kedua lemahnya infrastruktur keuangan, itulah sebabnya proses penarikan terjadi pada saat yang bersamaan. (Herawati and Gustan 2020)

Dari tahun 2006 hingga 2007, suku bunga pinjaman naik sebanyak dua kali. Ketika pinjaman real estate disekuritisasi, masalah pinjaman real estate mulai muncul, bahkan banyak yang dibeli oleh lembaga keuangan. Pada akhirnya, lembaga keuangan tersebut menerima pendanaan tetapi kehilangan nilai aset karena sekuritisasi. Amerika Serikat telah meminta lembaga keuangannya untuk memperketat peringkat kredit di seluruh dunia karena harga aset-aset ini turun, yang menyebabkan banyak bank dan modal pemerintah AS runtuh. (Nezky 2013)

Selain itu, ketika hipotek subprime dihapuskan pada tahun sebelumnya pada bulan Agustus 2008, pasar real estat AS mengalami gelombang ekonomi lagi. Depresi ekonomi secara keseluruhan adalah bahaya yang ditimbulkan oleh krisis ini. Pada tahun itu, kebangkrutan Northern Rock dan Bear Stearns British di Amerika Serikat menyebabkan kekacauan ekonomi global. Resesi ini diperkirakan akan menghentikan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja selama sepuluh tahun. Bahkan salah satu perusahaan asuransi terbesar, AIG, meminta pinjaman darurat sebesar \$40 miliar dari pemerintah AS untuk mencegah kebangkrutan total. (Herawati and Gustan 2020)

Sektor riil dan non-keuangan di seluruh dunia, termasuk negara berkembang, terkena dampak krisis keuangan Amerika Serikat. Perekonomian Indonesia, yang merupakan salah satu negara berkembang, juga terkena dampak. Indikator-indikator berikut menunjukkan hal ini. Dengan nilai tukar dolar terdepresiasi terhadap dolar AS, harga saham di bursa BEI turun tajam hingga level psikologis. Selain itu, sektor

perbankan menghadapi masalah likuiditas, dan bahkan pemerintah menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan di pasar keuangan. (Yin, Hong, and Yao 2023)

Banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami kenaikan harga komoditas global (impor), yang berdampak pada harga komoditas dalam negeri (ekspor) dan menyebabkan krisis pangan yang berdampak pada sekitar 36 negara. Dengan latar belakang ini, pemerintah berupaya mengambil berbagai langkah untuk mengurangi dampak situasi perekonomian global, terutama untuk kepentingan masyarakat kelas bawah. Meningkatnya harga pangan dan kebutuhan pokok telah menurunkan daya beli masyarakat, dan pemerintah meningkatkan tingkat subsidi bahan bakar, listrik, dan kebutuhan pokok untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal itu dilakukan dengan melakukan realokasi anggaran APBN dengan mengalihkan dana ke daerah lain. (Hidayat 2008)

KESIMPULAN

Studi tentang gaya pemerintahan dalam menghadapi krisis ekonomi menunjukkan bahwa kepemimpinan adaptif sangat penting. Di negara-negara berkembang, para pemimpin menggunakan kombinasi gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional untuk menangani tantangan ekonomi global. Gaya kepemimpinan ini seringkali otokratis, dengan intervensi langsung pemerintah, dan upaya mencapai stabilitas. Sebaliknya, para pemimpin negara maju lebih cenderung menerapkan kebijakan berbasis bukti dan menjadi lebih terstruktur dan berbasis data saat mereka proaktif menerapkan kebijakan fiskal dan moneter. Bukti kedua menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dalam menangani krisis ekonomi yang kompleks bergantung pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dan menerapkan pendekatan yang tepat. Perbedaan ini menunjukkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki negara maju yang memungkinkan mereka mengubah dan mengembangkan kebijakan baru. Penting untuk memahami perbedaan ini untuk membuat rencana yang baik untuk menghadapi masalah di masa depan. Hal ini terutama terjadi di negara-negara berkembang, yang memerlukan peningkatan kapasitas nasional dan partisipasi publik

Negara tersebut mungkin tidak mampu membayar utangnya di luar negerinya dan terjerumus ke dalam krisis ekonomi karena beban utang yang melebihi kemampuan membayarnya, neraca pembayaran yang besar, situasi yang tidak terkendali, dan investasi yang tidak efektif. Ketika krisis terjadi, Presiden Soeharto memimpin Indonesia. Indonesia mengumumkan beberapa tindakan untuk mengatasi krisis ekonomi 1997 di bawah kepemimpinannya. Ini termasuk upaya untuk mempertahankan devisa, kenaikan suku bunga BI, tertundanya proyek-proyek berskala besar, dan pengurangan pembelian dolar AS oleh BI. Rencana ini akan meningkatkan biaya modal, menjadikannya lebih mahal, dan membuat Indonesia bergantung pada bantuan Dana Moneter Internasional. Di bawah pemerintahan Kim Dae-jung, Korea Selatan melakukan restrukturisasi ekonomi, meminta bantuan keuangan dari IMF, dan menggunakan dana Bank Dunia untuk mengatasi krisis ekonomi tahun 1997. Kedua pemimpin tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan mengambil keputusan yang berbeda dengan latar belakang yang menarik. Berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, berkontribusi pada krisis ekonomi, dan Indonesia sangat beruntung dalam mengatasi krisis tersebut. Penurunan ketiga bursa tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia karena pelaku pasar saham hanya mewakili 0,5% penduduk Indonesia. Pada akhirnya, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara dengan perekonomian mandiri karena potensi yang dimilikinya. Meski pasar luar negeri lemah, namun pasar dalam negeri sudah sangat besar. Namun,

meskipun Indonesia memiliki aset-aset di atas, Indonesia tidak dapat sepenuhnya menghindari dampak krisis global terhadap pengangguran dan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Political Institutions and the Economic Crisis in Thailand and Indonesia Andrew MacIntyre * in T.J. Pempel (Ed.).” 1999. : 1–41.
- Asia, Krisis, and Agiis Widarjoio. 2003. “Evaluasi Kritis Kinerja IMF Dalam.” (50): 343–52. www.imf.org/.
- Herawati, Hasmiah, and Mukarramah Gustan. 2020. “Penyebab Dan Upaya Yang Dilakukan Para Pemerintah Dunia Saat Krisis Global 2008.” *AL MA’ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 2(1): 22–29. doi:10.35905/almaarief.v2i1.1442.
- Hidayat, Adrian. 2008. “Integrasi Ekonomi Asia: Solusi Asia Menghadapi Krisis Global 2008.” *The Winners* 9(2): 180. doi:10.21512/tw.v9i2.725.
- Iriansyah, Herinto Sidik. 2020. “Krisis Asia, Kapitalisme Dan Negara Kesejahteraan (Tinjauan Analisis Kapitalisme Korea Selatan).” *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara* 12(1): 53–60. doi:10.37640/jip.v12i1.277.
- Kaloka, Yola Natasyah, Putri Tegar, and M Eldy. 2019. “Strategi Korea Selatan Dalam Pemulihan Krisis Moneter Tahun 1997 Melalui IMF.” *Nation State Journal of International Studies* 2(1): 44–56. doi:10.24076/nsjis.2019v2i1.145.
- Keumala Sari, Putri, and Fakruddin. 2016. “Identifikasi Penyebab Krisis Moneter Dan Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia: Kasus Krisis Tahun.” *JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah* 1(2): 377–88. <https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/5831/2491>.
- Nezky, Mita. 2013. “Pengaruh Krisis Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Bursa Saham Dan Perdagangan Indonesia.” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 15(3): 89–103. doi:10.21098/bemp.v15i3.69.
- Sihono, Teguh. 2012. “Krisis Finansial Amerika Serikat Dan Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 5(2): 1–20. doi:10.21831/jep.v5i2.597.
- Sik, Kim Keun. 2010. “Special Foreign Policy Statement Regarding Peace and Unification . 2.” (Spring 2002): 101–2.
- Surapati, Putri Jasmine, Nada Nur Maulidina, Fayza Maritza Putri Agustono, and Hilda Ferira Pohan. 2021. “Comparative Analysis of President Soeharto and Kim Dae Jung’s Policies in Overcoming the 1997 Economic Crisis Based on Small Theory and Idiosyncratic Theory.” *Khazanah Sosial* 3(2): 74–83. doi:10.15575/ks.v3i2.11503.
- Yin, Fang, Xiao Hong, and Lin Yao. 2023. “The Global Financial Crisis and Economic Growth: An Analysis of the East Asian Economies.” *Pancasila International Journal of Applied Social Science* 1(01): 46–60. doi:10.59653/pancasila.v1i01.83.